

KONFLIK SIMBOLIS DAN PEMBENTUKAN NEGARA KOLONIAL: MEMIKIRKAN KEMBALI TRANSISI BRITANIA RAYA-BELANDA DI SULAWESI SELATAN 1811-1824

Hafsah,¹ Muhammad Nurhidayat Bahmi,² Muh. Zulkifli³

Sekolah Tinggi Agama Islam Yapis Takalar¹, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{2,3}

Email: hafsahsyamsul77@gmail.com¹, hidayatbahmi31@gmail.com²,
muh.zulkifli2306@gmail.com³

Received: March 17, 2026

Revised: June 02, 2026

Accepted: June 16, 2026

Abstract

This study analyzes the British-Dutch power transition (1811–1824) in South Sulawesi, arguing that this period was a critical phase in the formation of the modern colonial state rather than merely a historical interlude. Employing a critical historical method with an interdisciplinary political-anthropological approach, the study analyzes colonial archival data and Lontara manuscripts using “thick description” to interpret the symbolic contestation over sacred regalia Kalompoang. The findings reveal that the British arrival triggered a multidimensional conflict with the Kingdom of Bone regarding the legitimacy of the Sudang sword—a conflict the British failed to win due to guerrilla warfare, economic blockades, and resource constraints. The Dutch inherited this latent conflict and subsequently launched the Nieuwe Organisatie (New Organization) and the 1824 revision of the Treaty of Bongaya as systematic efforts to establish a colonial bureaucratic infrastructure. Theoretically, the study demonstrates that this transition period acted as a catalyst, transforming the contractual model of the VOC era into a centralized colonial state. Practically, the study reconstructs regional historiography by showing that the pattern of colonialism in Eastern Indonesia was profoundly shaped by the dynamic interplay of local political agency, symbolic conflict, and colonial regime changes during that formative era.

Keywords: *British-Dutch Transition; Colonial State Formation; Symbolic Conflict; Political Legitimacy South Sulawesi.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis masa transisi kekuasaan Inggris-Belanda (1811–1824) di Sulawesi Selatan untuk membuktikan bahwa periode tersebut merupakan fase kritis pembentukan negara kolonial modern, bukan sekadar jeda sejarah. Metode yang digunakan adalah sejarah kritis dengan pendekatan interdisipliner antropologi politik, di mana data arsip kolonial dan naskah *Lontara* dianalisis menggunakan teknik *thick description* untuk menafsirkan perebutan simbolik regalia sakral (*Kalompoang*). Hasil kajian menunjukkan bahwa kedatangan Inggris memicu konflik multidimensi dengan Kerajaan Bone terkait legitimasi pedang Sudang, yang gagal dimenangkan oleh Inggris akibat perang gerilya, blokade ekonomi, dan keterbatasan sumber daya. Konflik laten ini diwarisi oleh Belanda yang kemudian meluncurkan *Nieuwe Organisatie* dan Pembaruan Perjanjian Bongaya pada tahun 1824 sebagai upaya sistematis membangun infrastruktur birokrasi

kolonial. Implikasi dari penelitian ini secara teoretis membuktikan bahwa periode transisi tersebut berfungsi sebagai katalis yang mengubah model kontraktual era VOC menjadi negara kolonial yang terpusat. Secara praktis, studi ini merekonstruksi historiografi regional dengan memperlihatkan bahwa pola kolonialisme di Indonesia Timur sangat dibentuk oleh interaksi dinamis antara agensi politik lokal, konflik simbolik, dan perubahan rezim kolonial pada masa formatif tersebut.

Kata Kunci: Transisi Inggris-Belanda; Pembentukan Negara Kolonial; Konflik Simbolik; Legitimasi Politik Sulawesi Selatan.

Pendahuluan

Dalam historiografi Indonesia, periode pendudukan Inggris (1811-1816) seringkali mendapat perhatian yang tidak proporsional, dan dikaji secara mendalam dalam konteks Jawa di bawah Thomas Stamford Raffles, tetapi cenderung diabaikan atau disederhanakan dalam konteks wilayah-wilayah lain.¹ Di Sulawesi Selatan, narasi dominan (misalnya Vlekke dan Marwati) cenderung melihat masa ini sebagai selingan singkat antara dua periode kekuasaan Belanda, tanpa dampak struktural yang signifikan.² Pandangan ini mengabaikan kompleksitas dinamika politik lokal dan bagaimana interaksi singkat dengan administrasi Inggris justru mempercepat transformasi hubungan kekuasaan di wilayah tersebut. Melalui pendekatan *thick description* Clifford Geertz yang menekankan interpretasi mendalam terhadap sistem simbol dalam budaya.³ Artikel ini berargumen bahwa masa transisi Inggris-Belanda di Sulawesi Selatan (1811-1824) merupakan fase yang sangat menentukan dalam proses panjang pembentukan negara kolonial modern. Periode ini bukan sekadar *interregnum* pasif, melainkan momen konflik dan negosiasi intensif yang memaparkan pola hubungan antara kekuatan kolonial dan entitas politik lokal.

Gagasan sentral artikel ini adalah bahwa pertemuan antara proyek kolonial Inggris dan ambisi hegemoni Kerajaan Bone menciptakan konflik multidimensi yang berpusat pada perebutan otoritas legitimasi. Konflik ini dimanifestasikan secara konkret dalam perjuangan untuk menguasai benda-benda pusaka (*Kalompoang*) Kerajaan Gowa, terutama pedang *Sudang*, yang dalam kosmologi politik Bugis-Makassar mewakili jiwa dan legitimasi kekuasaan.⁴ Kegagalan Inggris untuk menyelesaikan konflik ini, akibat keterbatasan militer, logistik, dan ketidakpahaman budaya politik lokal, yang mewariskan keadaan yang semakin rumit bagi Belanda. Respon Belanda pada 1824 menandai pergeseran paradigma dari pendekatan kontraktual dan tidak langsung (warisan VOC) menuju upaya sistematis membangun negara kolonial melalui instrumen hukum dan administrasi.⁵ Dengan demikian, tahun 1824 menjadi titik balik dimana proyek negara kolonial mulai didefinisikan secara eksplisit, meskipun implementasinya penuh akan menghadapi perlawanan panjang.

¹Bernard H. M. Vlekke, "Nusantara: Sejarah Indonesia", PT Gramedia (Jakarta, 2008), h. 241-245.

²Marwati, "Sejarah Nasional Indonesia: Kemunculan Penjajahan Di Indonesia", Balai Pustaka (Jakarta, 2019), h. 214 - 215.

³Ahmad Riady, "Agama Dan Kebudayaan Masyarakat Perspektif Clifford Geertz", Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI), 2 (2021), h. 13-22.

⁴Thomas Gibson, "Islamic Narrative and Authority in Southeast Asia From The 16th to 21st Century" Palgrave Macmillan (New York, 2007), h. 248-253

⁵Dias Pradadimara, "Dibentuknya Negara Kolonial Di Sulawesi Bagian Selatan di Abad Ke 19M" Lensa Budaya: Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya, (2017), h. 59-61.

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa kajian tentang Sulawesi Selatan abad ke 19 masih didominasi oleh karya-karya awal seperti Vlekke dan Marwati yang cenderung naratif dan Jawa sentris.⁶ Studi Thomas Gibson tentang narasi Islam dan kekuasaan simbolik di Makassar telah membuka jalan bagi analisis yang lebih dalam tentang peran *Kalompoang*, tetapi belum secara khusus menyoroti pada periode transisi 1811-1824 sebagai momen katalitik.⁷ Karya Dias Pradadimara tentang pembentukan negara kolonial di Sulawesi Selatan sangat relevan, tetapi lebih fokus pada abad ke 19 akhir.⁸ Sementara itu, studi internasional tentang *patron klien* (scott) dan kewargaan prakolonial (Henley & Caldwell) menyediakan kerangka teoritis yang berguna namun belum banyak diterapkan pada periode transisi ini.⁹ Dengan demikian, posisi artikel ini adalah menawarkan reinterpretasi bahwa periode 1811-1824 bukanlah sekadar *interregnum*, melainkan fase formatif dimana konflik simbolik dan agensi lokal memaksa Belanda beralih dari pendekatan reaktif ke proyek negara kolonial modern. Artikel ini akan rekonstruksi lanskap politik akhir abad ke 18 M, menganalisis masa pemerintahan Inggris (1812-1816), melacak transisi kembali Belanda hingga 1824, dan diakhiri dengan analisis sintesis tentang signifikansi periode ini.

Metode

Kajian ini menggunakan pendekatan sejarah kritis yang berfokus pada analisis dinamis kekuasaan dan transformasi politik selama masa transisi kekuasaan Inggris-Belanda di Sulawesi Selatan.¹⁰ Metode ini dipilih untuk melampaui narasi peristiwa menuju penjelasan struktural mengenai interaksi antara proyek kolonial dan agensi politik lokal. Secara spesifik, penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis studi sejarah (*historical study*). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan kritis terhadap sumber-sumber sekunder yang memuat kutipan dan analisis dokumen primer.¹¹ Sumber utama meliputi karya-karya historiografis yang mengutip arsip kolonial Belanda dan Inggris (seperti laporan residen, korespondensi gubernur jenderal) serta kajian yang berbasis pada naskah lokal seperti *Lontara* (terutama *Lontara Sakke' Attoriolong Bone*), yang memungkinkan rekonstruksi perspektif ganda (kolonial dan lokal) atas konflik tersebut).

Verifikasi data dilakukan melalui kritik internal terhadap konsistensi dan kontekstualitas kutipan dalam sumber-sumber sekunder yang digunakan, dengan membandingkan berbagai sumber (*triangulasi sumber*) untuk menghindari bias tunggal.¹² Proses ini penting untuk

⁶Marwati, "Sejarah Nasional Indonesia: Kemunculan Penjajahan Di Indonesia", Balai Pustaka (Jakarta, 2019), h. 220 - 230

⁷Thomas Gibson, "Islamic Narrative and Authority in Southeast Asia From The 16th to 21st Century" Palgrave Macmillan (New York, 2007), h. 248-253

⁸Dias Pradadimara, "Dibentuknya Negara Kolonial Di Sulawesi Bagian Selatan di Abad Ke 19M" Lensa Budaya: Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya, (2017), h. 59-61

⁹James C. Scott, "Patron Client Politics and Political Change in Southeast Asia" American Political Science Review 66, no 1 (1972): 91-113; David Henley and Ian Caldwell, "Precolonial Citizenship in South Sulawesi" Citizenship Studies 23, no. 3 (2019) 240-255.

¹⁰Kartodirdjo, "Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah" PT Gramedia Pustaka Utama (Jakarta, 1992), h. 3-4.

¹¹Muhlis Hadrawi, "Lontara Sakke' Attoriolong Bone: Transliterasi Dan Terjemahan", Innawa Pustaka (Makassar, 2020).

¹²Kuntowijoyo, "Pengantar Ilmu Sejarah", PT Benteng Pustaka (Yogyakarta, 2018), h. 73-77

memastikan interpretasi didasarkan pada informasi yang terverifikasi, meskipun melalui medium kajian orang lain. Keterbatasan akses ke arsip primer langsung diakui, namun penggunaan sumber sekunder yang mengutip secara ekstensif (seperti karya Omar, Gibson, dan Hadrawi) memungkinkan rekonstruksi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Interpretasi menggunakan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif antropologi politik dan sejarah kolonial.¹³ Teknik analisis data digunakan adalah analisis interpretatif dengan metode *thick description* Clifford Geertz yang menekankan penafsiran mendalam terhadap sistem simbol dalam budaya.¹⁴ Pendekatan ini memungkinkan analisis atas perebutan benda pusaka (*Kalompoang*) tidak sekedar sebagai sengketa artefak, tetapi sebagai teks politik yang perlu diinterpretasi, sebuah pertarungan atas legitimasi dan tataran kosmologis. Selain itu, kerangka *patron client* dari James Scott digunakan untuk memahami dinamika loyalitas dan kekuasaan antara elite Bone dengan pengikutnya. Sintesis dari analisis ini menunjukkan bahwa periode 1811-1824 berfungsi sebagai fase katalitik yang mengkristalkan pola hubungan kolonial-lokal menuju model negara kolonial yang lebih terstruktur dan birokratis di Sulawesi Selatan.

Penemuan dan Pembahasan

Konteks Politik Sulawesi Selatan Akhir Abad Ke 18: Kebangkitan Bone dan Krisis Legitimasi Gowa

Memahami dinamika masa transisi Inggris-Belanda mengharuskan kita untuk melihat ke paruh kedua abad ke-18. Periode ini menyaksikan transformasi mendalam dalam peta politik Sulawesi Selatan, ditandai oleh kemunduran Kerajaan Gowa dan kebangkitan ambisius Kerajaan Bone sebagai kekuatan dominan baru.¹⁵ Transformasi ini tidak terjadi dalam vakum, tetapi dipengaruhi secara signifikan oleh melemahnya posisi Belanda (VOC) akibat krisis finansial dan keterlibatan dalam peperangan di Eropa.

Pasca Perjanjian Bongaya 1667, Bone memang telah menjadi sekutu utama VOC dan kekuatan politik terpenting di wilayah daratan Sulawesi Selatan.¹⁶ Namun, hubungan ini mulai berubah pada abad ke-18. Para penguasa Bone semakin percaya diri dan mulai mempertanyakan batas-batas kemitraan mereka dengan VOC.¹⁷ Perubahan sikap ini didorong oleh dua faktor utama: pertama, melemahnya kekuatan VOC secara finansial dan militer; kedua, munculnya krisis legitimasi yang parah di Kerajaan Gowa, tetangga dan rival tradisional Bone.

Krisis di Gowa mencapai puncaknya dengan munculnya tokoh kontroversial yang dikenal sebagai Sangkilang sekitar tahun 1776. Sangkilang mengklaim dirinya sebagai Batara Gowa, penguasa yang sah dan kembali dari pembuangan. Ia berhasil mendapatkan dukungan dari sebagian bangsawan dan rakyat Gowa, bahkan berhasil merebut benda-benda pusaka kerajaan (*Kalompoang*), termasuk pedang *Sudang* yang sangat sakral. Kekacauan ini menciptakan

¹³Kartodirdjo, "Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah", PT Gramedia Pustaka Utama (Jakarta, 1992), h. 3-4.

¹⁴Ahmad Riady, "Agama Dan Kebudayaan Masyarakat Perspektif Clifford Geertz", Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI), 2 (2021), h.17

¹⁵Pelras, "The Bugis" Inninawa (Makassar, 2021), h. 323-324

¹⁶Marwati, "Sejarah Nasional Indonesia: Kemunculan Penjajahan Di Indonesia", Balai Pustaka (Jakarta, 2019), h. 214 - 213.

¹⁷Suryadi Mappangara, "Bertahannya Bangsawan Bone di Tengah Perubahan Rezim" Masyarakat Indonesia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia (JIISI: Yogyakarta, 2011), h. 185

peluang sempurna bagi Bone. Setelah Sangkilang dikalahkan oleh pasukan gabungan VOC dan Bone, benda-benda pusaka tersebut akhirnya berpindah ke tangan Sultan Bone, La Tenri Tappu (Sultan Ahmad as-Saleh, memerintah 1775-1812).¹⁸ Perpindahan kepemilikan *Sudang* ini memiliki implikasi politik yang sangat dalam.

Dalam sistem politik dan kosmologi Bugis-Makassar, *Kalompoang* bukanlah sekadar artefak bersejarah. Ia adalah personifikasi dari negara itu sendiri, wadah *sumange* (jiwa atau spirit) kerajaan, dan sumber utama legitimasi politik.¹⁹ Siapa yang menguasai *Kalompoang*, terutama *Sudang*, dianggap memiliki hak untuk memerintah. Dengan menguasai *Sudang*, Sultan Ahmad Saleh tidak hanya menyimpan sebuah trofi, tetapi secara aktif membangun klaim atas takhta Gowa. Catatan hariannya dan laporan-laporan VOC menunjukkan bahwa ia secara sistematis memajukan klaim ini, baik berdasarkan garis keturunan (ia memiliki darah Gowa) maupun berdasarkan fakta kepemilikan benda pusaka. Ia bahkan mengusulkan kepada VOC agar putranya yang masih kecil diangkat sebagai Raja Gowa, dengan dirinya sendiri sebagai wali, dan merupakan sebuah strategi yang akan memberinya kendali *de facto* atas kerajaan saingannya itu.²⁰

VOC, bagaimanapun, menolak keras usulan ini. Bagi Belanda, mempertahankan pemisahan antara Bone dan Gowa merupakan prinsip kebijakan luar negeri yang fundamental (*divide et impera*).²¹ Mengizinkan penguasa Bone menguasai Gowa berarti menciptakan sebuah blok kekuatan yang terlalu besar dan berpotensi mengancam posisi mereka. Perdebatan sengit tentang nasib *Sudang* dan suksesi Gowa ini berlangsung selama bertahun-tahun antara pengadilan Bone dan pemerintahan VOC di Makassar, menciptakan ketegangan politik yang mendalam dan tidak terselesaikan.²² Sementara itu, konteks global semakin menguntungkan Bone. Perang Napoleon (1795-1815) melemahkan Belanda secara drastis. Komunikasi dengan patria (tanah air) terputus, pasokan dana dan bala bantuan sangat minim. Sultan Ahmad Saleh dengan cerdas memanfaatkan kelemahan ini. Ia memperluas pengaruh *de facto* Bone dengan menduduki wilayah-wilayah seperti Maros, Bantaeng, dan Bulukumba yang sebelumnya berada di bawah pengawasan atau klaim VOC.²³ Ia juga, menurut beberapa sumber, menjalin komunikasi rahasia dengan Inggris, musuh bebuyutan Belanda saat itu.²⁴ Ketika VOC secara resmi dibubarkan pada tahun 1799 dan pemerintah Hindia Belanda mengambil alih, warisan yang mereka terima di Sulawesi Selatan adalah sebuah posisi yang lemah dan sebuah kerajaan

¹⁸Thomas Gibson, *"Islamic Narrative and Authority in Southeast Asia From The 16th to 21st Century"* Palgrave Macmillan (New York, 2007), h. 248-253

¹⁹Thomas Gibson, *"Islamic Narrative and Authority in Southeast Asia From The 16th to 21st Century"* Palgrave Macmillan (New York, 2007), h. 248-249

²⁰Omar, *"The History of Bone A.D 1755-1795: The Diary of Sultan Ahmad as-Salleh"*, University of Hull, 2003, h. 91-92.

²¹Thomas Gibson, *"Islamic Narrative and Authority in Southeast Asia From The 16th to 21st Century"* Palgrave Macmillan (New York, 2007), h. 127-128.

²²Omar, *"The History of Bone A.D 1755-1795: The Diary of Sultan Ahmad as-Salleh"*, University of Hull, 2003, h. 91-92.

²³Palloge, *"Sejarah Kerajaan Tanah Bone: Masa Raja Pertama dan Raja-Raja Kemudiannya Sebelum Masuknya Islam Sampai Terakhir"*, Yayasan Al-Mualim (Makassar, 2006), h. 174-175.

²⁴Thomas Gibson, *"Islamic Narrative and Authority in Southeast Asia From The 16th to 21st Century"* Palgrave Macmillan (New York, 2007), h. 270.

Bone yang semakin kuat dan percaya diri.²⁵ Dengan demikian, gambaran yang muncul menjelang tahun 1811 bukanlah gambaran tentang sebuah wilayah yang pasif menunggu penjajah baru. Sebaliknya, Sulawesi Selatan didominasi oleh sebuah negara lokal yang sedang berada di puncak kekuatan dan ambisinya. Bone telah berhasil mentransformasikan dirinya dari sekutu VOC menjadi pesaing yang otonom. Transformasi ini dapat dianalisis melalui lensa 'politik *patron-klien*' James Scott,²⁶ di mana Bone berfungsi sebagai '*patron cluster*' yang mengkonsolidasikan pengikut melalui jaringan pertukaran vertikal yang bersifat personal dan instrumental. Ia memegang simbol legitimasi tertinggi (*Sudang*) yang memberinya klaim politik yang kuat atas kerajaan saingannya. Elite-elitnya terampil dalam diplomasi dan perang. Mereka memasuki era pendudukan Inggris bukan sebagai objek yang tak berdaya, tetapi sebagai aktor politik yang matang dengan agenda strategisnya sendiri.²⁷ Pertemuan antara proyek kolonial Inggris dan proyek hegemoni Bone hampir pasti akan menghasilkan konflik, dan konflik itu akan berpusat pada isu yang sama yang telah memisahkan Bone dan Belanda selama puluhan tahun: pertanyaan tentang siapa yang berhak menentukan legitimasi dan tatanan politik di Sulawesi Selatan.

Pemerintahan Inggris di Makassar (1812-1816): Konflik Terbuka dan Kegagalan Konsolidasi

Kekuasaan Inggris secara resmi dimulai di Makassar pada tanggal 8 Maret 1812, ketika Resident Richard Phillips menerima penyerahan kekuasaan dari Gubernur Belanda J.C. van Wicker Man.²⁸ Phillips, sebagai perwakilan dari Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles, membawa serta ethos pemerintahan yang liberal. Dalam beberapa bulan pertama, ia mengeluarkan kebijakan-kebijakan khas Raffles: membuka pelabuhan Makassar untuk perdagangan bebas bagi semua bangsa Eropa, dan pada November 1812, mengumumkan penghapusan perdagangan budak.²⁹ Namun, di Sulawesi Selatan, reformasi ekonomi dan sosial ini segera tertutupi oleh tantangan politik yang jauh lebih mendasar dan segera, yaitu penolakan keras dari Kerajaan Bone dan sekutu-sekutunya.

1. Akar Konflik: Penolakan Terhadap Transfer Kedaulatan dan Perebutan *Sudang*

Konflik dengan Bone muncul bahkan sebelum upacara serah terima berlangsung. Bone, bersama dengan Tanete dan Suppa, menolak untuk menghadiri upacara tersebut.³⁰ Penolakan ini bersifat prinsipil. Bagi penguasa Bone, status mereka adalah sebagai sekutu Belanda berdasarkan Perjanjian Bongaya, bukan sebagai bawahan atau jajahan. Oleh karena itu, Belanda tidak memiliki hak untuk "menyerahkan" mereka kepada pihak lain seperti barang dagangan. Sikap ini diungkapkan dengan keras oleh Sultan Bone La Tenri Tappu (yang wafat tak lama

²⁵Pelras, "*The Bugis*" Innawa (Makassar, 2021), h. 322.

²⁶James C. Scott, *Patron-Client and Politics and Political Change in Southeast Asia*, American Political Science Association (APSS: New York, 1972), h. 91.

²⁷David Henley, "*Precolonial Citizenship in South Sulawesi*", *Citizenship Studies*, (London, 2019), 23, (1), h. 245–247.

²⁸Dias Pradadimara, "*Dibentuknya Negara Kolonial Di Sulawesi Bagian Selatan di Abad Ke 19M*" Lensa Budaya: Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya, (2017), h. 58.

²⁹Sinaga et al., "*Kebijakan Inggris Dalam Kepemimpinan Thomas Raffles di Indonesia 1811-1816 M*", *Ar-Ruman: Jurnal Pendidikan dan Evaluasi Pembelajaran*, (Yogyakarta, 2024), (1), 2. h. 184.

³⁰Abduh et al., "*Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*", Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Jakarta, 1985), h. 44.

setelahnya) dalam surat protesnya: "Kami bukan budak pemerintah Belanda, kami hanyalah sekutunya... Kami lebih suka gugur di medan pertempuran daripada menjadi pembayaran utang perang."³¹ Pernyataan ini mencerminkan kesadaran politik yang tajam tentang kedaulatan dan martabat kerajaan.

Pengganti La Tenri Tappu, Sultan Muhammad Ismail (La Mappasessu To Appatunru, memerintah 1812-1823), meneruskan sikap konfrontatif ayahnya.³² Namun, pemicu konflik yang lebih langsung dan emosional adalah isu benda pusaka *Sudang*. Pemerintah Inggris, mungkin setelah mendengar laporan dari mantan pejabat Belanda yang masih bekerja untuk mereka, segera menuntut agar Bone menyerahkan *Sudang*.³³ Bagi Inggris, benda pusaka ini adalah alat politik. Dengan menguasainya, mereka dapat menggunakannya dalam upacara penobatan untuk mengukuhkan seorang Sultan Gowa yang patuh, sekaligus mencabut klaim legitimasi Bone atas Gowa, sehingga melemahkan posisi tawar penguasa Bone yang paling berbahaya.³⁴

Tuntutan Inggris ini berbenturan dengan pandangan dunia politik Bone. Menurut *Lontara Sakke' Attoriolong* Bone, hukum adat Gowa jelas: "Barang siapa yang memegang harta benda kerajaan Gowa, maka dirinyalah sebagai Karaéng Gowa."³⁵ Menyerahkan *Sudang* bukan hanya kehilangan sebuah benda berharga, tetapi berarti melepaskan klaim politik yang sah atas takhta Gowa dan menyerahkan hak untuk menentukan pemimpinnya kepada kekuatan asing. Sultan Muhammad Ismail, dengan dukungan para bangsawan dan penasehatnya, menolak tuntutan Inggris.³⁶ Penolakan ini adalah penegasan atas otoritas politik dan hukum tradisional Bone terhadap klaim kedaulatan kolonial yang baru.

2. Bentuk dan Strategi Perlawanan Koalisi Bone-Tanete-Suppa

Penolakan atas ultimatum Inggris segera bereskalasi menjadi konflik bersenjata terbuka. Pada 7 Juni 1814, pasukan gabungan Inggris yang didukung oleh sekutu lokalnya (Gowa, Sidenreng, Soppeng) menyerang dan membakar habis kompleks kediaman Bone di Bontoala, dekat Makassar.³⁷ Peristiwa ini, yang dicatat dalam sumber Inggris dan lontara, sering dilihat sebagai kemenangan militer Inggris. Namun dalam perspektif yang lebih luas, serangan ini justru menjadi awal dari fase perlawanan yang lebih luas, kompleks, dan efektif dari koalisi Bone. Sebelum serangan, Inggris telah mengeluarkan ultimatum yang diabaikan Bone, disertai manifes

³¹Palloge, "Sejarah Kerajaan Tanah Bone: Masa Raja Pertama dan Raja-Raja Kemudiannya Sebelum Masuknya Islam Sampai Terakhir", Yayasan Al-Mualim (Makassar, 2006), h.175.

³²Muhlis Hadrawi, "Lontara Sakke' Attoriolong Bone: Transliterasi Dan Terjemahan", Innawa Pustaka (Makassar, 2020), h. 477.

³³Thomas Gibson, "Islamic Narrative and Authority in Southeast Asia From The 16th to 21st Century" Palgrave Macmillan (New York, 2007), h. 131.

³⁴Omar, "The History of Bone A.D 1755-1795: The Diary of Sultan Ahmad as-Salleh", University of Hull, 2003, h. 96.

³⁵Muhlis Hadrawi, "Lontara Sakke' Attoriolong Bone: Transliterasi Dan Terjemahan", Innawa Pustaka (Makassar, 2020), h. 477.

³⁶Muhlis Hadrawi, "Lontara Sakke' Attoriolong Bone: Transliterasi Dan Terjemahan", Innawa Pustaka (Makassar, 2020), h. 478.

³⁷Abduh et al., "Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan", Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Jakarta, 1985), h. 44-45.

berisi 11 poin tuduhan yang mencakup perluasan wilayah, pengacauan perdagangan, dan tantangan terhadap otoritas Residen.³⁸

Setelah kekalahan di Bontoala, Bone dan sekutunya beralih ke strategi perang gerilya dan perang ekonomi. Mereka menarik diri ke pedalaman dan mulai melancarkan serangan-serangan terhadap pos-pos Inggris. Lebih penting lagi, mereka merebut kembali kendali atas wilayah-wilayah yang sebelumnya telah mereka kuasai, seperti Maros, Bantaeng, dan Bulukumba.³⁹ Strategi yang paling merusak bagi kepentingan Inggris adalah blokade ekonomi. Bone melarang pedagang-pedagang Bugis-Makassar yang berada di bawah pengaruhnya untuk menggunakan pelabuhan Makassar. Sebagai gantinya, arus perdagangan dialihkan ke pelabuhan-pelabuhan di Teluk Bone seperti Parepare.⁴⁰ Blokade ini terbukti efektif memutus pasokan dan melumpuhkan ambisi komersial Inggris, sekaligus memperkuat kendali Bone atas wilayah-wilayah penting seperti Bantaeng dan Bulukumba (*Oostder Provincie*) yang berhasil direbut kembali dari kendali Inggris.⁴¹ Upaya-upaya Inggris untuk membalas melalui ekspedisi militer seringkali berakhir dengan kegagalan. Contoh nyata adalah ketika ekspedisi yang dipimpin Letnan Jackson pada 1815, yang bertujuan membantu Soppeng yang diserang Bone, dicegat dan dikalahkan oleh pasukan Suppa di wilayah Parepare. Letnan Jackson tewas dalam pertempuran tersebut.⁴²

Perlawanan yang efektif ini menunjukkan tingkat koordinasi dan perencanaan yang signifikan di antara Bone, Tanete, dan Suppa. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi melancarkan serangan-serangan ofensif yang terkoordinasi pada tahun 1815.⁴³ Di sisi lain, loyalitas sekutu-sekutu lokal Inggris dipertanyakan. Laporan Residen Philips sendiri mengungkapkan keraguan dan frustrasi tentang kesetiaan kerajaan-kerajaan seperti Gowa dan Sidenreng yang seharusnya mendukung mereka.⁴⁴ Inggris menemukan diri mereka terjebak dalam perang darat yang melelahkan dan mahal melawan musuh yang sangat memahami medan, didukung oleh jaringan sosial-politik yang dalam, dan termotivasi oleh tujuan politik yang jelas: mempertahankan otonomi dan otoritas tradisional mereka.

3. Keterbatasan dan Kegagalan Akhir Inggris

Beberapa faktor menjelaskan mengapa Inggris, meski memiliki kekuatan militer superior, gagal menaklukkan koalisi Bone. Pertama, faktor logistik dan kesehatan. Pasukan Inggris di Makassar dilanda penyakit tropis seperti malaria dan disentri, yang mengurangi jumlah pasukan yang siap tempur secara signifikan. Data arsip menunjukkan kondisi yang memprihatinkan: pada September 1814, di Benteng Rotterdam terdapat 70 orang Eropa dan 215 orang pribumi yang

³⁸Latif, "The Conflict Between Bone Kingdom and The British Authorities in South Sulawesi 1812-1816 M," Tawarikh: Journal History of Studies (Jawa Tengah, 2014), h. 145-146.

³⁹Palloge, "Sejarah Kerajaan Tanah Bone: Masa Raja Pertama dan Raja-Raja Kemudiannya Sebelum Masuknya Islam Sampai Terakhir", Yayasan Al-Mualim (Makassar, 2006), 178-179.

⁴⁰Sartika, "Perjuangan Colliq Pujie Melawan Penjajah Belanda di Tanete", Repository UIN Alauddin Makassar (Makassar, 2021), h. 19.

⁴¹Latif, "The Conflict Between Bone Kingdom and The British Authorities in South Sulawesi 1812-1816 M," Tawarikh: Journal History of Studies (Jawa Tengah, 2014), h. 147.

⁴²Sartika, "Perjuangan Colliq Pujie Melawan Penjajah Belanda di Tanete", Repository UIN Alauddin Makassar (Makassar, 2021), h. 25-26.

⁴³Palloge, "Sejarah Kerajaan Tanah Bone: Masa Raja Pertama dan Raja-Raja Kemudiannya Sebelum Masuknya Islam Sampai Terakhir", Yayasan Al-Mualim (Makassar, 2006), h. 178

⁴⁴Sartika, "Perjuangan Colliq Pujie Melawan Penjajah Belanda di Tanete", Repository UIN Alauddin Makassar (Makassar, 2021), h. 27.

sakit, melebihi kapasitas rumah sakit, dengan pasokan obat yang menipis dan ransum makanan yang terbatas.⁴⁵

Kedua, komitmen terbatas. Pemerintahan Inggris di Jawa (Raffles) dan kemudian di India (penggantinya) memiliki prioritas lain dan sumber daya terbatas untuk dikirim ke Sulawesi Selatan, yang dianggap sebagai wilayah pinggiran.⁴⁶

Ketiga, ketidakpahaman budaya politik. Administrasi Inggris, yang baru beberapa tahun berada di wilayah itu, gagal memahami sepenuhnya pentingnya simbiosis *Sudang* dan kedalaman ikatan *patron-client* yang mengikat elite Bone dengan pengikutnya. Kegagalan ini menunjukkan ketidakpahaman Inggris terhadap logika 'politik *patron-client*' lokal. Seperti yang dijelaskan Scott, jaringan *patron-client* tradisional di Asia Tenggara memiliki ketahanan tinggi karena bersifat 'difus dan personal' (*diffuse, whole-person relationships*), dimana loyalitas *client* kepada *patron* (Sultan Bone) didasarkan pada pertukaran multidimensi yang tidak mudah diputus oleh intervensi eksternal.⁴⁷ Mereka memperlakukan Bone sebagai negara yang bisa ditaklukkan melalui kekuatan militer belaka, tanpa menyadari bahwa legitimasi dan jaringan sosial justru menjadi sumber ketahanannya.⁴⁸

Pada tahun 1816, Inggris praktis hanya menguasai kota Makassar dan benteng-bentengnya.⁴⁹ Wilayah pedalaman dikuasai oleh atau setidaknya tidak aman bagi Inggris karena aktivitas gerilya koalisi Bone. Keputusan untuk meninggalkan Sulawesi Selatan dan seluruh Hindia, tidak didiktekan oleh situasi di lapangan, tetapi oleh keputusan diplomatik di Eropa: Konvensi London 1814, yang mewajibkan Inggris mengembalikan wilayah jajahan Belanda setelah kekalahan Napoleon.⁵⁰ Mayor Dalton menyerahkan Makassar kepada Komisaris Belanda P.T. Chasse pada 25 September 1816.⁵¹

Warisan yang ditinggalkan Inggris bagi Belanda sangatlah problematis. Mereka meninggalkan konflik bersenjata yang belum terselesaikan dengan koalisi Bone yang masih kuat dan bermusuhan. Mereka meninggalkan ketegangan politik yang berpusat pada isu *Sudang*, yang meskipun akhirnya berhasil direbut dari Bone melalui perantara Datu Soppeng dan Arung Mampu, tetap menyisakan luka politik yang dalam.⁵² Yang terpenting, mereka telah membuktikan kepada elite lokal bahwa kekuatan kolonial Eropa bisa dilawan dan dikalahkan, setidaknya secara taktis. Perlawanan koalisi Bone menciptakan cetak biru strategis, dengan gabungan perang gerilya, blokade ekonomi, dan diplomasi antar-kerajaan, yang akan digunakan

⁴⁵Latif, "The Conflict Between Bone Kingdom and The British Authorities in South Sulawesi 1812-1816 M," Tawarikh: Journal History of Studies (Jawa Tengah, 2014), h. 148.

⁴⁶Dias Pradadimara, "Dibentuknya Negara Kolonial Di Sulawesi Bagian Selatan di Abad Ke 19M" Lensa Budaya: Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya, (2017), h. 3-4.

⁴⁷James C. Scoot, *Patron-Client and Politics and Political Change in Southeast Asia*, American Political Science Association (APSS: New York, 1972), h. 94.

⁴⁸David Henley, "Precolonial Citizenship in South Sulawesi", *Citizenship Studies*, (London, 2019), 23, (1), h. 245-247-248.

⁴⁹Abduh et al., "Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan", Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Jakarta, 1985), h. 46.

⁵⁰Pelras, "The Bugis" Inninawa (Makassar, 2021), h. 82.

⁵¹Sartika, "Perjuangan Colliq Pujie Melawan Penjajah Belanda di Tanete", *Repository UIN Alauddin Makassar* (Makassar, 2021), h. 28.

⁵²Omar, "The History of Bone A.D 1755-1795: The Diary of Sultan Ahmad as-Salleh", *University of Hull*, 2003, h. 98.

kembali melawan Belanda di masa depan. Dengan demikian, Belanda kembali ke sebuah Sulawesi Selatan yang secara politis lebih terpolarisasi, militeristik, dan percaya diri dibandingkan ketika mereka meninggalkannya lebih dari lima tahun sebelumnya.

Kembalinya Belanda dan Upaya Konsolidasi Kolonial (1816-1824 M)

Pemerintahan Belanda pasca-1816 menghadapi dilema ganda di Sulawesi Selatan: di satu sisi, mereka harus menegaskan kembali kedaulatan kolonial yang telah lama mereka klaim; di sisi lain, mereka mewarisi konflik terbuka dengan kekuatan lokal terkuat di wilayah tersebut. Periode antara 1816 hingga 1824 dapat digambarkan sebagai fase "ketidakmenentuan" dan persiapan, dimana Belanda berusaha menilai situasi, mengumpulkan kekuatan, dan merumuskan strategi baru untuk mengatasi tantangan dari Bone dan sekutunya.⁵³

1. Fase Awal: Kebuntuan Diplomasi dan Kontinuitas Konflik (1816-1823 M)

Setelah upacara serah terima, pemerintah Belanda baru mencoba pendekatan diplomatik awal. Namun, tawaran damai mereka ditolak oleh Bone. Sultan Muhammad Ismail mengirimkan surat yang berisi serangkaian tuntutan yang mencerminkan ambisi maksimal Bone: pengakuan atas hak-hak istimewa Bone seperti pada era kejayaan Arung Palakka (abad ke-17), pengembalian wilayah Bontoala, dan pengakuan Belanda atas wilayah-wilayah seperti Maros dan Bantaeng yang telah dikuasai Bone.⁵⁴ Tuntutan-tuntutan ini jelas tidak dapat diterima oleh Belanda yang justru ingin menegaskan kedaulatan mutlak dan menarik kembali wilayah-wilayah yang "hilang". Komunikasi langsung pun mandek, kembali ke keadaan kebuntuan yang telah berlangsung sejak akhir era VOC.

Konflik bersenjata skala kecil dan sporadis terus berlanjut di wilayah perbatasan dan daerah-daerah yang diperebutkan. Situasi ini berlarut-larut tanpa penyelesaian jelas hingga kematian Sultan Muhammad Ismail pada tahun 1823.⁵⁵ Kematian ini membuka periode suksesi dan ketidakpastian internal di Bone, yang memberikan kesempatan bagi Belanda untuk memikirkan dan merencanakan pendekatan yang lebih sistematis.

2. Titik Tengah 1824 M: Van der Capellen dan Cetak Biru Negara Kolonial

Titik tengah dari sebuah strategis yang terjadi pada tahun 1824 M dengan kunjungan Gubernur Jenderal G.A.G.P. Baron van der Capellen ke Makassar. Kunjungan ini didorong oleh beberapa faktor: laporan tentang ketidakstabilan terus-menerus di Sulawesi Selatan, kekhawatiran akan pengaruh ekonomi dan politik Inggris yang masih kuat di kawasan (terutama melalui Singapura), dan keinginan pribadi Van der Capellen untuk menertibkan wilayah-wilayah luar Jawa.⁵⁶ Selama kunjungannya, Van der Capellen meluncurkan dua kebijakan besar yang bersama-sama membentuk cetak biru awal untuk negara kolonial di Sulawesi Selatan.

Kebijakan pertama adalah penerbitan *Nieuwe Organisatie voor het Gouvernement van Makassar* (Organisasi Baru untuk Pemerintahan Makassar) pada 17 Juli 1824. Regulasi ini bertujuan untuk menata ulang secara radikal administrasi wilayah-wilayah yang secara langsung dikuasai Belanda (*gouvernementslanden*). Wilayah tersebut dibagi menjadi distrik-distrik (seperti

⁵³Dias Pradadimara, "Dibentuknya Negara Kolonial Di Sulawesi Bagian Selatan di Abad Ke 19M" Lensa Budaya: Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya, (2017), h. 58-59

⁵⁴Palloge, "Sejarah Kerajaan Tanah Bone: Masa Raja Pertama dan Raja-Raja Kemudiannya Sebelum Masuknya Islam Sampai Terakhir", Yayasan Al-Mualim (Makassar, 2006), h. 181.

⁵⁵Suryadi Mappangara, "Bertahannya Bangsawan Bone di Tengah Perubahan Rezim" Masyarakat Indonesia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia (JIISI: Yogyakarta, 2011), h. 193 - 194.

⁵⁶Dias Pradadimara, "Dibentuknya Negara Kolonial Di Sulawesi Bagian Selatan di Abad Ke 19M" Lensa Budaya: Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya, (2017), h. 59.

Makassar, Maros, Bantaeng-Bulukumba) yang masing-masing dipimpin oleh seorang residen atau magistrat Belanda, yang dibantu oleh pejabat pribumi (*regent*).⁵⁷ Ini adalah langkah jelas menuju birokratisasi, sentralisasi, dan regularisasi pemerintahan, menjauh dari model VOC yang longgar dan berbasis perjanjian.

Kebijakan kedua, dan yang lebih politis secara langsung, adalah upaya untuk memaksakan *Vernieuwen Bongaisch Contract* (Perjanjian Bongaya yang Diperbarui). Perjanjian baru ini dimaksudkan untuk menggantikan semua perjanjian lama yang terpisah-pisah dengan berbagai kerajaan dengan satu kerangka hukum tunggal yang menegaskan supremasi Belanda. Upaya Belanda melalui *Nieuwe Organisatie* 1824 dapat dibaca sebagai usaha ‘denasionalisasi patronase’, yaitu mengalihkan basis patronase dari struktur *patron-client* tradisional ke aparatur birokrasi kolonial. Ini merupakan transformasi dari ‘*local resource control*’ menuju ‘*external, office-based resources*’ dalam terminologi Scott.⁵⁸

Isinya dirancang dengan cermat: klausul-klausul yang menghina Gowa sebagai pihak yang kalah di Perjanjian Bongaya 1667 dihapus, sehingga meningkatkan status Gowa. Namun, yang paling krusial, Pasal 3 perjanjian baru ini menyatakan bahwa semua penguasa yang menandatangani adalah sederajat (*green superioritas*).⁵⁹ Klausul ini adalah pukulan telak dan disengaja terhadap Bone, karena secara resmi menghapuskan hak istimewa dan status superior yang telah mereka perjuangkan mati-matian, baik melawan Belanda sebelumnya maupun melawan Inggris.

Respon dari kerajaan-kerajaan lokal terbelah, mencerminkan perpecahan politik yang sudah ada. Kerajaan-kerajaan seperti Gowa dan Sidenreng, yang sudah lama bekerja sama erat dengan Belanda dan merasa diuntungkan oleh klausul rehabilitasi Gowa, menandatangani perjanjian baru tersebut.⁶⁰ Namun, bagi Bone, yang kini dipimpin oleh I Mani Ratu Sultanah Rajituddin, serta bagi Tanete dan Suppa, perjanjian itu sama sekali tidak dapat diterima. Menandatanganinya berarti mengakui secara resmi hilangnya status istimewa mereka dan menyerahkan sisa-sisa otonomi kepada struktur kolonial yang sedang dibangun Belanda.⁶¹ Mereka menolak keras untuk menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan Van der Capellen dan menolak untuk menandatangani.

3. Eskalasi Militer dan Dampak Perang Jawa

Penolakan terbuka ini memicu respons militer dari Belanda. Pada tahun 1824, Belanda meluncurkan ekspedisi militer terbatas untuk menghukum Suppa, Tanete, dan mencoba menekan Bone. Pertempuran-pertempuran terjadi dengan hasil yang beragam. Suppa memberikan perlawanan sengit dan berhasil memukul mundur serangan awal Belanda.⁶²

⁵⁷Dias Pradadimara, "Dibentuknya Negara Kolonial Di Sulawesi Bagian Selatan di Abad Ke 19M" *Lensa Budaya: Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya*, (2017), h. 60.

⁵⁸James C. Scott, *Patron-Client and Politics and Political Change in Southeast Asia*, *American Political Science Association* (APSS: New York, 1972), h. 106–107

⁵⁹Dias Pradadimara, "Dibentuknya Negara Kolonial Di Sulawesi Bagian Selatan di Abad Ke 19M" *Lensa Budaya: Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya*, (2017), h. 60-61.

⁶⁰Abduh et al., "Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan", Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Jakarta, 1985), h. 48.

⁶¹Marwati, "Sejarah Nasional Indonesia: Kemunculan Penjajahan Di Indonesia", Balai Pustaka (Jakarta, 2019), h. 215–217.

⁶²Abduh et al., "Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan", Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Jakarta, 1985), h. 48.

Pasukan Belanda mengalami beberapa kesulitan, tetapi secara umum berhasil menekan posisi koalisi. Rencana untuk meluncurkan kampanye militer besar-besaran dan menentukan melawan jantung pertahanan Bone sendiri telah disusun.

Namun, rencana besar ini tiba-tiba harus dihentikan. Pada tahun 1825, Perang Diponegoro (Perang Jawa) meletus. Konflik besar di Jawa ini menyerap hampir seluruh sumber daya militer, finansial, dan perhatian politik pemerintah Hindia Belanda. Pasukan-pasukan yang direncanakan untuk Sulawesi Selatan dialihkan ke Jawa. Ekspedisi yang ambisius untuk menaklukkan Bone terpaksa ditunda.⁶³ Meskipun secara militer tidak mencapai tujuan akhirnya, tahun 1824 tetap menjadi momen penting secara strategis dan simbolis. Kebijakan Van der Capellen telah meletakkan kerangka hukum, administratif, dan politik untuk negara kolonial di Sulawesi Selatan. *Nieuwe Organisatie* menetapkan struktur pemerintahan langsung. Perjanjian 1824, meski ditolak oleh beberapa pihak kunci, menjadi dasar klaim legal Belanda atas supremasi mereka terhadap semua kerajaan. Perlawanan Bone, meski berhasil mempertahankan otonomi *de facto* untuk sementara waktu, kini menghadapi sebuah negara kolonial yang tidak lagi hanya mengandalkan strategi *divide et impera* dan perjanjian-perjanjian usang, tetapi sedang membangun aparatur negara yang lebih terpusat, birokratis, dan ambisius.⁶⁴ Periode transisi yang dimulai dengan kedatangan Inggris secara resmi berakhir dengan dimulainya proyek negara kolonial yang sistematis, meskipun proyek itu sendiri masih akan menghadapi ujian panjang dan berdarah selama beberapa dekade ke depan sebelum akhirnya terwujud sepenuhnya pada awal abad ke-20.

Analisis: Periode Transisi Sebagai Katalis Dalam Proses Pembentukan Negara Kolonial (1816-1824 M)

Berdasarkan rekonstruksi peristiwa-peristiwa dari 1811 hingga 1824 di atas, kita dapat menarik beberapa analisis mendalam tentang signifikansi periode transisi ini dalam konteks yang lebih luas, yaitu proses pembentukan negara kolonial di Hindia Belanda abad ke-19.

1. Kontinuitas Konflik Dalam Perubahan Rezim: Legitimasi Sebagai Medan Pertempuran Utama

Salah satu temuan paling mencolok adalah kontinuitas isu yang mendasari konflik, meskipun aktor kolonialnya berganti dari VOC ke Inggris lalu kembali ke Belanda.⁶⁵ Isu sentralnya selalu berupa perebutan hak untuk menentukan dan mengontrol legitimasi politik di Sulawesi Selatan. Bagi VOC/Inggris/Belanda, memonopoli hak legitimasi, dengan menguasai *Sudang* dan hak untuk mengangkat penguasa lokal merupakan langkah penting dalam membangun kedaulatan kolonial yang efektif.⁶⁶ Bagi Bone, mempertahankan hak tersebut

⁶³Dias Pradadimara, "Dibentuknya Negara Kolonial Di Sulawesi Bagian Selatan di Abad Ke 19M" *Lensa Budaya: Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya*, (2017), h. 61.

⁶⁴Dias Pradadimara, "Dibentuknya Negara Kolonial Di Sulawesi Bagian Selatan di Abad Ke 19M" *Lensa Budaya: Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya*, (2017), h. 62.

⁶⁵Omar, s "The History of Bone A.D 1755-1795: The Diary of Sultan Ahmad as-Salleh", *University of Hull*, 2003, h. 91-96.

⁶⁶Thomas Gibson, "Islamic Narrative and Authority in Southeast Asia From The 16th to 21st Century" *Palgrave Macmillan* (New York, 2007), h. 131.

dengan memegang *Sudang* dan mengklaim hak atas takhta Gowa, merupakan inti dari proyek membangun hegemoninya sendiri dan mempertahankan otonomi.⁶⁷

Periode transisi dengan demikian memperlihatkan bahwa pergantian kekuasaan di tingkat kolonial tidak serta-merta mengubah logika fundamental pertarungan di tingkat lokal. Hal ini menyoroti betapa pentingnya dimensi simbolik, budaya, dan legitimasi dalam ekspansi kolonial dan dalam resistensi terhadapnya. Perang tidak hanya memperebutkan tanah dan sumber daya, tetapi juga narasi, simbol, dan hak untuk berbicara atas nama "tatanan yang sah".

2. Kegagalan Inggris: Cermin Keterbatasan Kekuatan Kolonial dan Keunggulan Strategi Lokal

Kegagalan Inggris untuk menaklukkan Bone, meski memiliki kekuatan militer yang superior, adalah episode yang sangat informatif. Kegagalan ini mengungkap keterbatasan mendasar dari kekuatan kolonial konvensional dalam menghadapi jenis perlawanan tertentu.⁶⁸ Konflik ini dapat dibaca melalui lensa 'negara teater' Clifford Geertz di mana ritual dan simbol berfungsi sebagai 'pernyataan politik metafisik' (*metaphysical theatre*) yang menegaskan hubungan antara status duniawi dan legitimasi kosmik. Perebutan *Sudang* bukan sekadar konflik militer, melainkan pertarungan atas hak untuk menampilkan 'pertunjukan' kekuasaan yang sah di panggung politik Sulawesi Selatan.⁶⁹ Kegagalan militer Inggris, seperti dalam ekspedisi Letnan Jackson ke Suppa (1815) yang berakhir dengan tewasnya komandan tersebut, bukanlah insiden tunggal.⁷⁰ Serangkaian kekalahan di Maros, Bulukumba, dan Sigeri menunjukkan pola bahwa pasukan reguler Eropa tidak efektif melawan perang gerilya dan strategi penghindaran yang diterapkan koalisi Bone di medan yang mereka kuasai.

Lebih penting lagi, kegagalan Inggris menyoroti kecanggihan dan efektivitas strategi politik-ekonomi-militer koalisi Bone. Mereka bukan sekadar "memberontak"; mereka melaksanakan strategi terkoordinasi yang memanfaatkan kelemahan musuh. Blokade terhadap Makassar menunjukkan pemahaman yang tajam tentang ekonomi politik kolonial awal.⁷¹ Jaringan sekutu mereka (Tanete, Suppa, dan kadang elemen di Wajo) menunjukkan kemampuan diplomasi dan politik yang matang.⁷² Perlawanan mereka efektif karena bertumpu pada struktur sosial-politik pra kolonial yang telah berkembang dengan baik, sistem *patron-client* yang kuat, konsepsi tentang hak dan kewajiban yang mirip dengan "kewarganegaraan" pra kolonial bagi orang merdeka (*tomaradéka*), dan institusi-institusi kenegaraan yang stabil.⁷³ Inggris, dalam beberapa hal, bertemu dengan sebuah "negara" tandingan yang terorganisir, yang tidak mudah

⁶⁷Muhlis Hadrawi, "*Lontara Sakke' Attoriolong Bone: Transliterasi Dan Terjemahan*", Inninawa Pustaka (Makassar, 2020), h. 477.

⁶⁸Sartika, "*Perjuangan Colliq Pujie Melawan Penjajah Belanda di Tanete*", Repository UIN Alauddin Makassar (Makassar, 2021), h. 22-27.

⁶⁹(Clifford Geertz, "*Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali*", Princeton University, (United Kingdom, 1980), h. 104.

⁷⁰Latif, "*The Conflict Between Bone Kingdom and The British Authorities in South Sulawesi 1812-1816 M*," Tawarikh: Journal History of Studies (Jawa Tengah, 2014), h. 155-156.

⁷¹Latif, "*The Conflict Between Bone Kingdom and The British Authorities in South Sulawesi 1812-1816 M*," Tawarikh: Journal History of Studies (Jawa Tengah, 2014), h. 147.

⁷²Palloge, "*Sejarah Kerajaan Tanah Bone: Masa Raja Pertama dan Raja-Raja Kemudiannya Sebelum Masuknya Islam Sampai Terakhir*", Yayasan Al-Mualim (Makassar, 2006), h. 176-79.

⁷³(Henley & Caldwell, 2019, h. 245-248)

dihancurkan hanya dengan merebut sebuah ibu kota atau mengalahkan pasukan dalam pertempuran terbuka.

3. Tahun 1824 M Sebagai Batu Loncatan Menuju Negara Kolonial Modern

Jika Inggris gagal menaklukkan, respon Belanda pada tahun 1824 menandai peralihan menuju pendekatan yang berbeda secara kualitatif. *Nieuwe Organisatie* dan Perjanjian Bongaya yang Diperbarui bukan sekadar kelanjutan dari kebijakan VOC yang bersifat reaktif dan oportunistik. Keduanya merepresentasikan upaya yang disengaja dan sistematis untuk mentransformasikan hubungan politik di Sulawesi Selatan. Seperti 'negara teater' di Bali yang dijelaskan Geertz di mana ritual merupakan 'dramaturgi tendensius' untuk menegaskan hierarki konflik atas *Kalompang* di Sulawesi Selatan merupakan perjuangan untuk mengontrol 'panggung simbolik' tempat legitimasi politik dipertunjukkan dan divalidasi. Transformasi ini bergerak dari model hubungan yang bersifat kontraktual, personal, dan tidak langsung dengan berbagai kerajaan, menuju model hubungan yang lebih hierarkis, impersonal, dan terintegrasi ke dalam sebuah struktur administratif dan hukum tunggal di bawah kedaulatan langsung negara kolonial.⁷⁴ Inilah esensi dari pembentukan negara kolonial modern: penciptaan monopoli kekerasan yang sah, birokrasi rasional, dan sistem hukum yang seragam.

Meskipun penerapan cetak biru 1824 ini masih parsial dan langsung menghadapi perlawanan, kerangka yang diletakkannya akan menjadi acuan dan justifikasi bagi semua kebijakan Belanda selanjutnya di Sulawesi Selatan. Penaklukan militer akhir pada 1905, yang menghancurkan otonomi Bone, pada dasarnya adalah eksekusi paksa, setelah puluhan tahun penundaan dan persiapan dari proyek negara kolonial yang telah dirumuskan pada 1824.⁷⁵ Dengan demikian, 1824 berfungsi sebagai titik pijakan ideologis dan administratif, sebuah deklarasi niat kolonial yang baru.

4. Agensi Lokal dan Pembentukan Pola Sejarah Kolonial

Kajian ini secara kuat mendukung pentingnya agensi lokal dalam membentuk jalannya sejarah kolonial.⁷⁶ Bone bukanlah objek pasif dari kekuatan-kekuatan besar. Ambisi regionalnya, strategi diplomasi dan militernya yang cerdas, serta penolakannya yang gigih untuk tunduk, secara aktif membentuk keputusan dan strategi baik Inggris maupun Belanda. Pola hubungan kolonial yang khas di Sulawesi Selatan sepanjang abad ke-19, ditandai oleh perang berkepanjangan yang diselingi gencatan senjata yang rapuh, negosiasi yang alot, dan integrasi yang tertunda, sebagian besar adalah hasil dari kekuatan dan ketahanan Bone.⁷⁷ Periode transisi 1811-1824 berfungsi sebagai katalis yang mengkristalkan pola ini. Ia mengubah ketegangan antara Bone dan Belanda dari perselisihan diplomatik menjadi konflik terbuka, dan kemudian memaksa Belanda untuk merespons dengan proyek negara yang lebih ambisius. Dengan kata lain, resistensi lokal tidak hanya menanggapi kolonialisme, tetapi juga secara aktif membentuk bentuk dan jalurnya.

Dapat dilihat dari temuan di atas bahwasanya, menjelang tahun 1811, Sulawesi Selatan didominasi oleh negara lokal yang sedang berada di puncak kekuatan dan ambisinya. Bone telah

⁷⁴Dias Pradadimara, "Dibentuknya Negara Kolonial Di Sulawesi Bagian Selatan di Abad Ke 19M" *Lensa Budaya: Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya*, (2017), h. 59-61.

⁷⁵Dias Pradadimara, "Dibentuknya Negara Kolonial Di Sulawesi Bagian Selatan di Abad Ke 19M" *Lensa Budaya: Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya*, (2017), h. 60-62.

⁷⁶Suryadi Mappangara, "Bertahannya Bangsawan Bone di Tengah Perubahan Rezim" *Masyarakat Indonesia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia (JIISI: Yogyakarta*, 2011), h. 185-187

⁷⁷Abduh et al., "Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan", *Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Jakarta*, 1985), h. 49-50.

mentransformasikan diri dari sekutu VOC menjadi pesaing otonom. Melalui lensa “politik patron klien” James Scott, Bone berfungsi sebagai *patron cluster* yang mengkonsolidasikan pengikut melalui jaringan pertukaran vertikal yang bersifat personal dan instrumental. Ia memegang simbol legitimasi tertinggi (*Sudang*), yang memberinya klaim politis kuat atas kerajaan saingannya. Konflik yang akan datang antara Inggris dan Bone, seperti yang akan kita lihat, bukanlah pertemuan antara penjajah dan pribumi yang tak berdaya, melainkan pertemuan antara dua proyek hegemoni yang saling bersaing. Temuan ini juga menegaskan pentingnya dimensi simbolik. *Kalompoang* bukan sekadar benda pusaka, melainkan personifikasi negara dan wadah sumange (jiwa) kerajaan. Dalam kerangka negara teater Geertz, ritual dan simbol di sini berfungsi sebagai pernyataan politik metafisik yang menegaskan hubungan antara status duniawi dan legitimasi kosmik. Oleh karena itu, perebutan *Sudang* bukan sekadar konflik militer, melainkan pertarungan atas hak untuk menampilkan 'pertunjukan' kekuasaan yang sah di panggung politik Sulawesi Selatan. Ini berbeda dengan narasi historiografi lama (Vlekke, Marwati) yang cenderung melihat periode ini sebagai masa kekacauan tanpa agensi lokal yang berarti. Dengan demikian, Bone memasuki era pendudukan Inggris sebagai aktor politik matang dengan agenda strateginya sendiri.

Kegagalan Inggris menaklukkan Bone, meskipun memiliki keunggulan militer, mengungkap keterbatasan kekuatan kolonial konvensional dalam menghadapi resistensi yang terorganisir secara sosial dan simbolik. Temuan ini dapat dianalisis melalui kerangka *patron-client* Scott: jaringan *patron-client* tradisional memiliki ketahanan tinggi karena loyalitas klien kepada Sultan Bone bersifat difus dan personal (*diffuse, whole-person relationships*), tidak mudah diputus oleh intervensi eksternal. Kegagalan militer Inggris (ekspedisi Jackson, kekalahan di Maros, Bulukumba, Segeri) menunjukkan bahwa pasukan reguler Eropa tidak efektif melawan perang gerilya di medan yang dikuasai lokal. Lebih penting lagi, koalisi Bone bukan sekadar memberontak, tetapi melaksanakan strategi terkoordinasi (militer, ekonomi, diplomasi) yang memanfaatkan kelemahan musuh. Ini menyoroti kecanggihan politik lokal yang sering diabaikan oleh narasi kolonial. Temuan ini juga mengkonfirmasi argumen Henley & Caldwell tentang keberadaan kewargaan prakolonial (*precolonial citizenship*) di Sulawesi Selatan, di mana orang merdeka (*tomaradéka*) memiliki hak dan kewajiban yang tidak bisa begitu saja dihapus oleh klaim kedaulatan asing. Dengan demikian, Inggris, dalam beberapa hal, bertemu dengan sebuah 'negara' tandingan yang terorganisir, tidak mudah dihancurkan hanya dengan merebut ibu kota. Ini berbeda dengan asumsi historiografi lama yang cenderung melihat perlawanan lokal sebagai *respons fragmentaris*. Kegagalan Inggris justru membuktikan bahwa Bone telah mengembangkan pola resistensi yang akan menjadi cetak biru bagi perlawanan selanjutnya terhadap Belanda.

Jika Inggris gagal menaklukkan, respon Belanda pada 1824 menandai peralihan kualitatif menuju pendekatan baru. *Nieuwe Organisatie* dan Perjanjian Bongaya Diperbarui bukan sekadar kelanjutan kebijakan VOC yang reaktif, melainkan upaya sistematis untuk mentransformasikan hubungan politik. Analisis ini sejalan dengan konsep *denasionalisasi patronase* dari Scott, dimana Belanda berusaha mengalihkan basis patronase dari struktur *patron-client* tradisional ke aparatur birokrasi *colonial* dari *local resource control* menuju *external, office-based resources*. Ini adalah esensi dari pembentukan negara kolonial modern: penciptaan monopoli kekerasan yang sah, birokrasi rasional, dan sistem hukum yang seragam. Meskipun penerapan cetak biru 1824 masih parsial dan menghadapi perlawanan, kerangka yang diletakkannya menjadi acuan bagi semua kebijakan Belanda selanjutnya. Penaklukan militer final Bone pada 1905, seperti dicatat Pradadimara, pada dasarnya adalah eksekusi paksa dari proyek negara kolonial yang telah dirumuskan pada 1824. Dengan demikian, 1824 berfungsi sebagai titik pijakan ideologis dan administrative sebuah deklarasi niat kolonial baru. Temuan ini memperkuat tesis utama artikel bahwa periode 1811-

1824 adalah fase formatif, bukan *interregnum*, karena di sinilah terjadi pergeseran paradigma dari hubungan kontraktual ke proyek negara kolonial.

Sintesis ini memperkuat argumen bahwa periode 1811-1824 berfungsi sebagai katalis. Seperti dijelaskan Geertz tentang negara teater, di mana kekuasaan dipentaskan melalui ritual dan simbol, upaya Belanda mengontrol *Sudang* adalah bagian dari proyek lebih besar merebut panggung simbolik tempat legitimasi dipertunjukkan. Periode ini juga menjembatani era VOC yang kontraktual dengan era negara kolonial Hindia Belanda yang terintegrasi. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi historiografi kolonial: kita harus memberikan perhatian serius pada momen-momen transisi kritis di 'pinggiran' (bukan hanya Jawa), karena di sanalah agensi lokal seringkali paling kuat dan proses state formation paling kontestatif. Pola hubungan kolonial yang khas di Sulawesi Selatan sepanjang abad ke-19. Perang berkepanjangan, gencatan senjata rapuh, integrasi tertunda sebagian besar adalah hasil dari kekuatan dan ketahanan Bone yang telah mengkristal selama periode transisi ini.

Kesimpulan

Masa transisi kekuasaan Inggris-Belanda di Sulawesi Selatan (1811-1824) merupakan periode yang signifikan dan formatif, jauh melampaui narasinya sebagai sekadar selingan administratif dalam sejarah kolonial Indonesia. Kegagalan Inggris, yang diakibatkan oleh resistensi tangguh Bone dan ketidakmampuan mereka memahami lanskap politik lokal, telah meninggalkan warisan konflik bersenjata dan ketegangan politik yang tak terselesaikan, memaksa Belanda untuk merumuskan pendekatan kolonial yang baru dan lebih sistematis pada 1824.

Konflik yang meletus segera setelah kedatangan Inggris berakar pada perebutan otoritas legitimasi, yang termanifestasi secara nyata dalam perjuangan untuk menguasai benda pusaka *Sudang*. Pemerintahan Inggris, meski memiliki keunggulan teknologi dan organisasi militer, gagal menaklukkan koalisi Bone-Tanete-Suppa. Kegagalan ini disebabkan oleh kombinasi faktor militer, logistik, dan yang paling krusial adalah ketidakmampuan untuk memahami dan mengatasi logika politik dan sumber ketahanan masyarakat lokal. Kegagalan Inggris meninggalkan warisan konflik yang belum terselesaikan dan sebuah wilayah yang semakin terpolarisasi bagi Belanda.

Respon Belanda, yang memuncak pada tahun 1824 di bawah Gubernur Jenderal Van der Capellen, menandai pergeseran paradigma dalam pendekatan kolonial. Seperti analisis Geertz tentang 'negara teater', di mana kekuasaan dipentaskan melalui ritual dan simbol, upaya Belanda untuk mengontrol *Sudang* merupakan bagian dari proyek yang lebih besar, yaitu merebut panggung simbolik tempat legitimasi politik dipertunjukkan. Dengan *Nieuwe Organisatie* dan Perjanjian Bongaya yang Diperbarui, Belanda meluncurkan upaya pertama yang sistematis untuk membangun infrastruktur negara kolonial modern di Sulawesi Selatan—sebuah upaya untuk menggantikan tatanan politik yang lama dengan struktur administratif dan hukum yang terpusat di bawah kedaulatan mereka. Meskipun upaya ini belum sepenuhnya berhasil pada 1824 dan akan tertunda oleh Perang Diponegoro, ia telah menetapkan kerangka hukum, politik, dan ideologis yang akan menuntun kebijakan kolonial selama delapan dekade berikutnya, hingga penaklukan militer final pada awal abad ke-20.

Dengan demikian, periode 1811-1824 berfungsi sebagai katalis sekaligus jembatan. Sebagai katalis, ia mempercepat eskalasi konflik dan memaparkan pola resistensi lokal terhadap intervensi asing. Sebagai jembatan, ia menghubungkan era hubungan kontraktual dan komersial era VOC dengan era ambisius negara kolonial Hindia Belanda yang terintegrasi. Kajian ini menegaskan bahwa untuk memahami secara komprehensif pembentukan negara kolonial di Indonesia, kita harus memberikan perhatian serius pada momen-momen transisi kritis seperti ini, saat agensi lokal yang kuat, konflik simbolis yang mendalam, dan perubahan rezim kolonial

saling berinteraksi secara dinamis untuk menghasilkan pola sejarah yang unik, kompleks, dan menentukan bagi nasib suatu wilayah.

Daftar Pustaka

- Abduh, M., Pawiloy, S., Masduki, Baso, M. N., & Abidin, Z. (1985). *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Geertz, C. (1980). *Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali*. Princeton University Press.
- Gibson, T. (2012). *Islamic Narrative and Authority in Southeast Asia from the 16th to the 21st century* (S. Nurhady (ed.)). Penerbit Ininnawa.
- Gibson, T. (2023). *Kekuasaan Raja, Syekh dan Ambtenaar: Pengetahuan Simbolik dan Kekuasaan Tradisional Makassar 1300-2000*. Penerbit Ininnawa.
- Hadrawi, M. (2020). *Lontara Sakke' Attoriolong Bone: Transliterasi dan Terjemahan*. Penerbit Ininnawa.
- Henley, D., & Caldwell, I. (2019). Precolonial citizenship in South Sulawesi. *Citizenship Studies*, 23(3), 240-255.
- Kartodirdjo, S. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo. (2018). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Penerbit Tiara Wacana.
- Latif, A. (2014). The Conflict between Bone Kingdom and the British Authority in South Sulawesi, 1812-1816. *Tawarikh*, 5(April), 145-160.
- Mappangara, S. (2011). Bertahannya Bangsawan Bone di Tengah Perubahan Rezim, 1811-1946. *Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, 37(1), 185-210.
- Omar, R. (2003). *The History of Bone A.D. 1775-1795: The Diary of Sultan Ahmad as-Salleh*. University of Hull.
- Palloge, A. (2006). *Sejarah Kerajaan Tanah Bone: Masa Raja Pertama dan Raja-Raja Kemudiannya Sebelum Masuknya Islam Sampai Terakhir*. Yayasan Al Muallim.
- Pelras, C. (2021). *The Bugis* (A. R. Abu (ed.)). Penerbit Ininnawa.
- Pradadimara, D. (2016). Modal Britania di Indonesia Masa Kolonial. *Mozaik Humaniora*, 16(2).
- Pradadimara, D. (2017). Dibentuknya Negara Kolonial di Sulawesi Bagian Selatan di Abad Ke 19. *Lensa Budaya*, 12(2), 56-70.
- Riady, A. S. (2021). Agama dan Kebudayaan Masyarakat Perspektif Clifford Geertz. *JSAI*, 2(1), 13-22.
- Sartika, D. (2021). *Perjuangan Colliq Pujie Melawan Penjajah Belanda di Tanete 1812-1876*. UIN Alauddin Makassar.
- Scott, J. C. (1972). Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia. *American Political Science Association*, 66(1), 91-113.
- Sinaga, R., Maulana, A., Lubis, R. A., & Sitepu, M. M. (2024). Kebijakan Inggris Dalam Kepemimpinan Thomas Raffles di Indonesia 1811-1816. *Ar Rumman*, 1(2), 180-187.
- Tim Penulis. (2019). *Sejarah Nasional Indonesia IV: Kemunculan Penjajahan di Indonesia (1700-1900)* (Ketujuh). Balai Pustaka.

Vlekke, B. H. M. (2016). *Nusantara: Sejarah Indonesia* (S. Berlian (ed.)). Kepustakaan Populer Gramedia.